

**SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DAN PERAN BUDAYA TERHADAP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Oleh: Anwar Aritin

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERAN BUDAYA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh: Anwar Arifin
Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI

Pendahuluan

Tatkala forum rektor dibentuk di kampus ITB Bandung, dikeluarkan sebuah "deklarasi" (kesepakatan pertemuan rektor seluruh Indonesia) tanggal 7 November 1998, yang antara lain berbunyi: "perlunya reformasi budaya yang diawali oleh reformasi pendidikan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk melancarkan reformasi yang menyeluruh". Salah satu kesepakatan atau deklarasi para rektor yang terdiri dari lima butir itu dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Lilik Hendrajaya (Rektor ITB Bandung), Prof. Dr. Thoby Mutis (Rektor Universitas Trisakti Jakarta) dan Prof. Dr. Anwar Arifin (Rektor UVRI Makassar), akhirnya masuk juga ke ruang sidang Komisi VI DPR-RI (bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata). Artinya semangat untuk melakukan reformasi pendidikan sebagai awal reformasi kebudayaan, disikapi dengan melakukan upaya membentuk undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, sejak awal tahun 2000. Pelopornya adalah sejumlah rektor atau mantan rektor antara lain Prof. Dr. Muhamadi, Prof. Dr. Mohtar Bobari, Prof. Dr. Parawangsa, Prof. A.N. Rajawane dan Prof. Dr. Baihaki AK. Mereka menjadi anggota DPR-RI sebagai buah dari reformasi.

Kini undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang sempat menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat itu telah disahkan oleh DPR RI tanggal 11 Juni 2003. Ada sejumlah paradigma baru yang diharapkan mendorong perkembangan kebudayaan di tanah air, dan berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Paradigma baru itu antara lain komitmen terhadap pendidikan yang bermutu, demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif; pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik; peningkatan partisipasi masyarakat; kurikulum berbasis kompetensi; standar nasional pendidikan; pendanaan yang cukup dengan pengelolaan yang berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas publik; menjamin keprofesionalan; serta keseimbangan antara akhlak mulia dan kecerdasan.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, berdasar Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan terbuka dan multi makna, dan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural (budaya) dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan untuk Kebudayaan

Salah satu fungsi pendidikan secara umum yang amat penting dan strategis ialah mendorong perkembangan kebudayaan dan peradaban pada tingkatan sosial yang

berbeda. Secara umum pendidikan pada level individu, membantu mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia yang berakhlak mulia, berwatak, cerdas, kreatif, sehat, estetik serta mampu melakukan sosialisasi dan transformasi, dari manusia pemain menjadi manusia pekerja dan dari manusia pekerja menjadi manusia pemikir.

Pada level yang lain pendidikan juga menimbulkan kemampuan individu menghargai dan menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka dan demokratis. Dengan demikian semakin banyak orang yang terdidik baik, maka semakin dapat dijamin adanya toleransi dan kerjasama antar budaya dalam suasana yang demokratis, yang pada gilirannya akan membentuk integrasi budaya nasional dan regional.

Peranan pendidikan terhadap kebudayaan diakui oleh semua negara. Itulah sebabnya semua negara maju menganut paradigma bahwa pendidikan adalah sektor publik. Artinya publik dengan berdasarkan kemampuan penalaran individual yang didukung oleh akhlak mulia, maka setiap individu memiliki akses secara demokratis untuk mendapatkan pendidikan yang mutu. Jalur yang paling demokratis untuk meningkatkan kualitas diri dan melakukan mobilitas sosial, adalah pendidikan. Itulah sebabnya pendidikan tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar. Artinya siapa yang berani membayar mahal itulah yang dapat. Hal ini akan meruntuhkan kebudayaan dan peradaban. Justru itu negara harus mengambil peranan dengan menyediakan dana yang cukup agar pendidikan tidak terjebak pada mekanisme pasar, dan supaya pendidikan tetap berada di jalur yang benar sebagai sektor publik yang mampu berperan dalam mengembangkan kebudayaan yang rasional, demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Dalam Undang-undang Sisdiknas yang akan mengikat segenap bangsa Indonesia dalam kurung waktu ke depan, telah ditetapkan tentang pendanaan pendidikan (Bab XIII) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat. Demikian juga dana pendidikan diluar gaji pendidik, dan biaya pendidikan kedisiplinan dialokasikan minimal 20% dari APBN kesektor pendidikan dan 20% dari APBD. Jelas kemauan politik untuk menjadikan pendidikan sebagai sektor publik yang harus dibiayai oleh pemerintah, telah ditetapkan dalam Undang-undang Sisdiknas sebagai penjabaran UUD 1945 (pasal 31 ayat 4).

Selain itu dalam Undang-undang Sisdiknas sebagai salah satu prinsip pendidikan, yaitu bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dan memberdayakan semua komponen masyarakat masyarakat (pasal 4). Bahkan secara khusus pendidikan nasional digariskan fungsinya secara jelas. yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 3). Demikian juga tujuannya jelas berkaitan dengan kebudayaan dan peradaban, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3).

Iman dan taqwa serta akhlak mulia, sehat dan ilmu sangat diperlukan oleh setiap individu untuk menopang kebudayaannya. Sedangkan kebudayaan dapat dipahami

sebagai gagasan vital yang dimiliki oleh setiap orang dalam merespons lingkungannya. Itulah sebabnya kebudayaan akan merasuk kesemua sektor, sehingga kini semakin dikenal istilah kebudayaan politik, kebudayaan ekonomi, kebudayaan birokrasi dan kebudayaan hukum.

Kebudayaan sebagai Kekuatan Pembangunan

Perhatian para ilmuwan kepada kebudayaan dalam dua dekade terakhir ini memperlihatkan betapa pentingnya kebudayaan sebagai faktor utama dalam hidup manusia. Dalam era Soeharto yang menggunakan paradigma modernisasi yang telah gagal itu, memang selalu terdengar bahwa kebudayaan Indonesia tidak kondusif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu perubahan budaya agar pembangunan nasional yang dijalankan bangsa Indonesia dapat membuat hasil yang optimal.

Tak dapat disangkal bahwa selama periode yang menonjolkan pembangunan ekonomi dengan menggunakan paradigma modernisasi yang dicangkok dari Amerika Serikat (kedatipun paradigma itu sesungguhnya sudah runtuh di negerinya dalam dekade 60-an), banyak sekali upaya pembaharuan yang dilakukan di Indonesia yang kemudian dianggap gagal karena tertumbuk oleh kebudayaan. Itulah sebabnya kebudayaan selalu dipandang sebagai faktor penghambat pembangunan ekonomi, penghambat demokrasi dan sebagainya.

Padahal sesungguhnya kebudayaan yang kita miliki seharusnya menjadi kekuatan yang prima dalam pembangunan yang berkelanjutan, Hal ini disebabkan karena selama ini kita selalu mengambil teori dari luar untuk membangun negeri kita sendiri, yang relevansinya masih perlu diragukan.

Kini sudah waktunya kita sadar bahwa teori yang dibuat dari hasil masyarakat Barat, belum tentu berguna bagi Indonesia, sehingga kita perlu melakukan penemuan kembali kebudayaan Indonesia untuk dijadikan kekuatan pembangunan, dengan mengubah paradigma modernisasi menjadi paradigma Indonesianisasi. Disinilah diperlukan pendidikan dan penelitian yang serius tentang masyarakat Indonesia sendiri, dan menerbitkan buku teks untuk dikonsumsi oleh mahasiswa. Selama ini diakui bahwa sekitar 85 % buku teks yang beredar di Indonesia adalah hasil pemikiran pakar asing, yang secara tidak sadar telah membuat masyarakat Indonesia telah mengalami penetrasi kebudayaan asing secara besar-besaran selama 50 tahun lamanya. Hingga kini ilmuwan Indonesia belum banyak yang mampu membikin ilmu sendiri, karena selama ini penelitian ilmiah di Indonesia tidak berkembang pesat. Budaya sebagai konsumen ilmu juga tumbuh pesat sejalan dengan kebiasaan sebagai konsumen barang dan jasa dalam segala jenis.

Paradigma modernisasi yang dominan di Indonesia selama ini memang pada dasarnya melihat kebudayaan sebagai penghambat. Justru itu sasaran utama dari modernisasi itu ialah mengubah kebudayaan tradisional menjadi kebudayaan modern. Budaya tradisional ialah menyerah pada alam, sedang budaya modern adalah menundukkan alam (akhirnya merusak lingkungan). Itulah sebabnya modernisasi diiringi oleh rasionalisasi, sekularisasi, modal asing dan konsumenisasi, sehingga semua yang dari luar itu dipandang sangat baik. Akhirnya bangsa Indonesia mengalami nasib seperti :

"Si Malin Kundang yang durhaka pada ibunya" atau "Si Doel Anak Betawi" atau "Si Doel Anak Sekolah yang tersingkir ke pinggir Jakarta" (Bangsa Indonesia sekarang dililit oleh utang luar negeri, sebagai akibat modernisasi).

Dengan gagalnya paradigma modernisasi sebagai landasan pembangunan, maka sudah saatnya kita memperkenalkan paradigma baru pembangunan yaitu **Pembangunan Diri** dengan menggunakan kebudayaan Indonesia sebagai kekuatan dasar. Demikian juga kekuatan lokal genius yang selama ini diremehkan dan dipinggirkan oleh modernisasi, sudah waktunya diberikan perhatian dan peranan yang sentral. Dengan kata lain paradigma modernisasi harus diganti dengan paradigma baru pembangunan, yaitu paradigma **Indonesianisasi** atau pembangunan diri.

Dalam paradigma Indonesianisasi, kita dapat melakukan redefenisi tentang pembangunan, yaitu bagaimana bangsa Indonesia mau dan mampu menolong dirinya sendiri. Dengan demikian kita dapat menetapkan dan memilih defenisi baru pembangunan yang betkelanjutan yaitu: *"suatu proses partisipasi disegala bidang dalam perubahan sosial dalam suatu masyarakat dengan tujuan membuat kemajuan sosial dan material (termasuk pemerataan, kebebasan serta berbagai kwalilas lainnya secara lebih-besar) bagi sebagian besar masyarakat dengan kemampuan yang lebih besar untuk mengatur lingkungannya"*.

Bangsa Indonesia harus sadar bahwa pembangunan harus dari dan oleh bangsa Indonesia untuk bangsa Indonesia (bukan seperti pembangunan Jakarta yang telah melempar warganya seperti Si Doel Anak Betawi ke pinggir Jakarta). Justru itu bangsa Indonesia harus mampu menentukan sendiri model dan paradigma pembangunan dengan terlebih dahulu menentukan tujuan pembangunannya sendiri, yaitu masyarakat macam apa yang harus kita bangun. Pembangunan tidak boleh membuat bangsa Indonesia menjadi asing atau menjadi kuli di negerinya sendiri. Harus disadari bahwa tidak ada paradigma pembangunan yang berlaku secara universal, karena setiap masyarakat memiliki ciri tersendiri dan memiliki cara sendiri dalam membangun bangsanya sendiri.

Pada hakekatnya setiap bangsa dalam membangun dirinya sendiri senantiasa memiliki kekuatan sendiri dalam dinamika internalnya. Hal ini mampu mendukung dan menyukkseskan pembangunannya, yang sesungguhnya bersumber dari kebudayaan dan tradisi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain kebudayaan dan tradisi tertentu tidak boleh dipandang sebagai penghambat, melainkan merupakan potensi dan kekuatan bagi proses kemajuan suatu bangsa.

Indonesianisasi dan Globalisasi

Paradigma Indonesianisasi adalah paradigma yang **berwawasan keindonesiaan**, dan paling tepat dalam pembangunan berkelanjutan, karena sejalan dengan globalisasi yang digerakkan oleh revolusi informasi. Artinya Indonesianisasi dan globalisasi sangat sejalan dan bahkan juga dapat memenuhi tuntutan pelaksanaan otonomi daerah.

Revolusi komunikasi yang mendorong globalisasi pada hakekatnya meningkatkan kemampuan manusia menghemat waktu dan menaklukkan ruang, dengan lahirnya kegiatan jarak jauh seperti belanja jarak jauh, menabung jarak jauh, bekerja jarak jauh, pendidikan jarak jauh, konfrensi jarak jauh, dan sebagainya. Salah satu prinsip dalam

revolusi informasi atau komunikasi dan dalam tatanan global baru (*global paradox*), ialah terjadinya *lokalisasi*, *kecilisasi*, dan *spesifikasi (unikisasi)*. Dibidang ekonomi disebutkan oleh John Naisbitt, bahwa semakin besar ekonomi dunia semakin kuat perusahaan kecil. Hal itu telah terbukti ketika terjadi krisis moneter dunia tahun 1998, dimana perusahaan besar mengalami keruntuhan dan justru yang dapat bertahan adalah perusahaan-perusahaan kecil. Di Amerika Serikat dan di Jerman selama satu dekade terakhir ini, sudah terdiri 50% ekspor kedua negara itu diciptakan oleh perusahaan-perusahaan kecil dengan maksimal hanya 19 orang karyawan.

Ciri lain dari globalisasi ialah perlunya produk dengan ciri dan keunggulan lokal, untuk dipasarkan secara global, semboyannya: "**Berpikir lokal bertindak global**". Maksudnya gunakanlah kekuatan lokal (ciri dan keunggulan lokal) untuk meraih sukses global. Hal-hal yang bersifat lokal dengan segala keunikan dan keunggulannya dapat diterima dalam ekonomi global oleh bantuan teknologi komunikasi yang canggih. Hal ini juga berkembang melalui aktivitas industri dan kegiatan pariwisata, yang menjadi ciri dan salah satu Penggerak ekonomi global.

Berdasarkan paradigma kelIndonesiaan yang sejalan dengan globalisasi itu, maka struktur pendidikan di Indonesia itu harus juga diubah dengan memberikan muatan lokal yang banyak. Itulah sebabnya dalam Undang-undang Sisdiknas yang disahkan tanggal 11 Juni 2003, telah dimasukkan sebuah paradigma baru pendidikan yang mampu memperkaya kebudayaan Indonesia pada masa depan dan menjadikannya kekuatan pembangunan. Hal itu dituangkan dalam pasal 50 ayat (5), berbunyi : "**Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal**". Hal ini merupakan substansi progresif sehingga dapat mengubah nasib masyarakat lokal pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya di masa depan, jika hal ini diaplikasikan dengan baik.

Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dimaksudkan, selain peserta didik memiliki keakraban dengan lingkungan terdekatnya, juga untuk melahirkan lulusan yang siap mengembangkan potensi lokal, dan dengan keunggulan dan keunikan lokal itu dapat memenangkan persaingan dalam globalisasi. Demikian juga substansi tersebut berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja lokal di daerah otonom, mencegah urbanisasi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan daerah. Hasil-hasil produksi lokal itu dapat dipasarkan secara global melalui jaringan teknologi informasi (internet).

Selain itu juga dimaksudkan substansi baru yang dapat mengembangkan kebudayaan Indonesia pada pasal 50 ayat (3) yang berbunyi : "**Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional**". Substansi ini dimaksudkan agar satuan-satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (pusat) atau pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat dikembangkan menjadi satuan yang bertaraf internasional, paling kurang dapat sejajar dengan satuan pendidikan di negara-negara tetangga, Dengan demikian putra-putri kita tidak perlu lagi ke luar negeri untuk memperoleh pendidikan dengan mutu internasional. Standar internasional pendidikan dapat dirumuskan melalui peraturan pemerintah, sejalan dengan standar nasional pendidikan yang dirumuskan pada pasal 35 Undang-undang Sisdiknas.

Penutup

Reformasi pendidikan sebagai awal reformasi budaya telah dilakukan dengan pembentukan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disahkan tanggal 11 Juni 2003. Melalui penerapan undang-undang itu dilapangan reformasi budaya akan berlangsung untuk melancarkan reformasi secara keseluruhan. Kebudayaan Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai penghambat pembangunan melainkan sebaliknya kebudayaan harus digunakan sebagai kekuatan yang memainkan peranan strategis dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam upaya memanfaatkan peran budaya sebagai kekuatan pembangunan itu, maka paradigma **modernisasi** yang selama ini digunakan sebagai acuan pembangunan, harus diganti dengan paradigma baru yang **berwawasan keIndonesiaan**, yaitu paradigma **pembangunan diri** atau paradigma **Indonesianisasi**. Paradigma Indonesianisasi itu akan mengembangkan budaya dan sumber daya Indonesia, dan sekaligus menggunakannya sebagai kekuatan dan motivasi pembangunan. Hal ini sejalan dengan tuntutan globalisasi (tatanan global baru) yang digerakkan oleh teknologi informasi (revolusi informasi) dan sekaligus sesuai dengan aplikasi otonomi daerah.

Jakarta/Denpasar, 15 Juli 2003